



Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Peovinsi Jawa Barat Tahun 2011-2019

Dahlia Tsalsalaila¹, Harya Kuncara Wiralaga², Siti Fatimah Zahra³

^{1,2,3} Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta

Abstract

Received: 14 September 2022
Revised: 18 September 2022
Accepted: 25 September 2022

This study examines the relationship between economic growth and the minimum wage in West Java, the relationship between inflation and the minimum wage in West Java, and the relationship between economic growth and inflation with the minimum wage in West Java.

The approach used in this research is a quantitative approach. Data collection uses secondary data by looking at the Central Statistics Agency for the province of West Java and government regulations regarding the minimum wage policy for the districts/cities of West Java province. The time series in this study is 9 years from 2011-2019 and the research object is 7 cities in West Java province. Hypothesis testing was done by using panel data regression test. The results of the study show that: (1) Economic growth has a negative and significant effect on the minimum wage of West Java province, showing a t-value of -2.890015 and a probability value of 0.0054 which is lower than 0.05. (2) Inflation has a positive and significant effect on the minimum wage of West Java province, showing a t-value of 6.538082 and a probability value of 0.0000 which is lower than 0.05. (3) Together, Economic Growth and Inflation have a significant effect on the minimum wage of West Java province, the calculated f value is 22.09883, which is greater than f table of 3.153 with a probability value of 0.000000 f-statistics, which is lower than 0.05.

Keywords: *Economic Growth, Inflation, Minimum Wage*

(*) Corresponding Author: dahliatsalsalaila6@gmail.com

How to Cite: Tsalsalaila, D., Wiralag, H., & Zahra, S. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Peovinsi Jawa Barat Tahun 2011-2019. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(18), 101-113. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7133967>.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 pasal 1 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Maka dalam hal ini tenaga kerja memiliki peran penting dalam proses pembangunan suatu negara.

Jumlah tenaga kerja di Indonesia tahun 2019 sebanyak 128 755,27 ribu orang dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 sebanyak 268,1 juta jiwa (bps.go.id, diakses pada tanggal 25 juni 2022). Maka diharapkan dengan jumlah tenaga kerja tersebut segala bentuk kebutuhan hidup masyarakat dapat terpenuhi sehingga pembangunan perekonomian suatu negara dapat terus meningkat. Peran tenaga kerja dalam pembangunan memiliki dua sisi, sebagai objek dan subjek. Sebagai objek yaitu tenaga kerja perlu dibangun dan di sejahterakan, lalu sebagai subjek yaitu tenaga kerja merupakan pelaku dari pembangunan (Indriani, 2016).

Sedangkan di sisi perusahaan membutuhkan produktivitas tenaga kerja agar dapat menghasilkan output sesuai kebutuhan perusahaan. Dengan hal tersebut perusahaan dapat mencapai tujuannya. Agar tujuan perusahaan dapat terlaksana dengan baik maka diperlukannya manajemen tenaga kerja, manajemen tenaga kerja merupakan pendayagunaan, pembinaan, pengaturan, pengurusan, pengembangan unsur tenaga kerja, baik yang berstatus sebagai buruh, karyawan, maupun pegawai dengan segala kegiatannya dalam usaha mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya, sesuai dengan harapan usaha perorangan, badan usaha, perusahaan, lembaga, maupun instansi (Siswanto & Asrie, 2019). Diharapkan dengan adanya manajemen tenaga kerja perusahaan dapat lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja dengan memberikan upah yang sesuai. Upah menurut Pasal 88A ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa upah merupakan hak para pekerja yang diterima dari para pemberi kerja yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tujuan pemberian upah yaitu, memberikan hak bagi para karyawan, memberikan rasa keadilan, mempertahankan karyawan, mematuhi peraturan pemerintah, dan menghindari konflik (Kasmir, 2016). Upah memiliki penempatan yang strategis bagi tenaga kerja, pengusaha atau perusahaan dan pemerintah. Upah bagi tenaga kerja merupakan hak pekerja yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Arrista, 2014). Upah bagi perusahaan merupakan biaya produksi sehingga harga barang atau produk yang dihasilkan mempengaruhi tinggi rendahnya upah (Akhmad, 2018).

Dari pengertian upah tersebut memiliki makna yang berbeda bagi tenaga kerja dan bagi perusahaan. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran untuk memberikan kesejahteraan kepada tenaga kerja dan pengusaha atau pemberi kerja, agar terjalin serasi, harmonis, menjaga produktivitas usaha (Akhmad, 2018). Bagi tenaga kerja, upah merupakan indikator penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup tenaga kerja, buruh atau karyawan suatu perusahaan. Oleh karena itu, para pekerja berharap upah yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Upah merupakan pembayaran yang diperoleh dari berbagai proses bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh pengusaha kepada tenaga kerja (Sukirno, 2013). Di lain sisi pengusaha bahwa pemberian upah merupakan biaya produksi sehingga dapat mengurangi nilai laba perusahaan (Azmi, 2012). Maka, dalam hal ini pemerintah memberlakukan Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Regional di setiap wilayah agar dapat memberikan kesejahteraan bagi pekerja dan pengusaha. Mekanisme dalam menetapkan upah minimum dilakukan oleh gubernur dengan mempertimbangkan usulan dari dewan pengupahan provinsi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013 pasal 1 tentang pengupahan menyatakan bahwa upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah minimum terbagi menjadi dua, yaitu Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Regional. Pertimbangan lain dalam menetapkan upah untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi

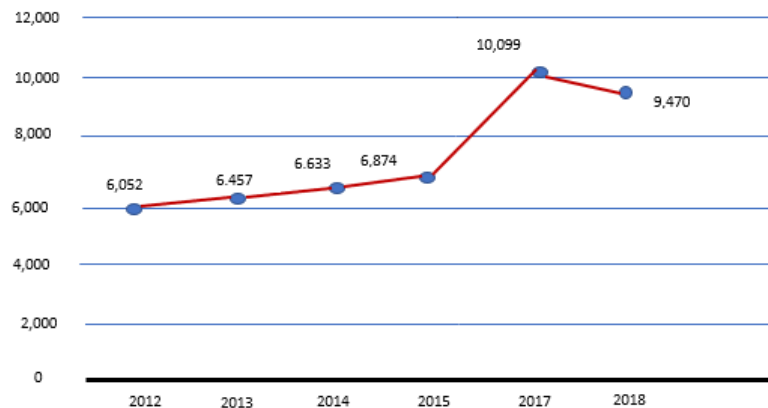
daerah bahkan inflasi sehingga besar harapan bahwa upah tenaga kerja dapat naik secara signifikan.

Pentingnya kebijakan upah minimum agar terjadinya keselarasan antara perusahaan dan tenaga kerja, sehingga tidak terjadinya penyalahgunaan kebijakan pemerintah dengan memberikan upah dibawah ketentuan peraturan upah minimum yang sudah berlaku disetiap daerahnya. Kebijakan upah minimum digunakan untuk menghindari segala bentuk kecurangan perusahaan dengan mencari untung sebesar-besarnya dan mengeksploitasi para tenaga kerja. Oleh karena itu, pentingnya kebijakan upah minimum harus meningkatkan kebutuhan hidup layak bagi para tenaga kerja tanpa harus merugikan perusahaan yang dapat mengancam keberlangsungan pertumbuhan ekonomi serta produktivitas nasional (Devanto & Putu, 2011). Dalam kebijakan pemerintah provinsi terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja bahwa tujuan penetapan upah salah satu diantaranya untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Jumlah penduduk yang bekerja pada setiap kategori lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Februari 2018 masih didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 30,46 persen; Perdagangan sebesar 18,53 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 14,11 persen (BPS Indonesia, 2018).

Sektor industri menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan negara berkembang. Sektor industri sebagai sektor pemimpin yang dapat mendorong perkembangan sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan, sektor jasa ataupun sektor pertanian (Edy Dwi Kurniati, 2015).

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah perusahaan industri terbanyak di Indonesia sehingga secara tidak langsung penyerapan tenaga kerjanya ikut meningkat. Berikut merupakan grafik jumlah perusahaan industri di Jawa Barat.

Grafik 1.1
Jumlah Perusahaan Industri di Jawa Barat
2012-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 perkembangan industri yang tercatat dalam direktori industri di Jawa Barat mengalami tren terus meningkat. Pada akhir tahun 2012 tercatat terdapat 6.052 perusahaan/usaha industri besar dan sedang. Peningkatan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yakni meningkat sebesar 46,92 persen dari 2 tahun sebelumnya atau meningkat sebanyak 3.225 perusahaan. Pada tahun 2016 dilakukan Sensus Ekonomi sehingga, data pada tahun tersebut tidak ditampilkan. Pada tahun 2018 jumlah industri besar dan sedang di Jawa Barat mengalami penurunan 6,22 persen dari kondisi pada tahun 2017 menjadi 9.470 perusahaan (BPS Jawa Barat, 2018). Dilansir dari laman tempo.co Ridwan Kamil (2019) menyatakan bahwa terdapat 140 lebih perusahaan tutup dan pindah ke provinsi lain bahkan ke luar negeri. Hampir semua alasan penutupan dan pemindahan tersebut berkaitan dengan upah yang tinggi. Dengan hal tersebut membuat kinerja usaha tidak efisien. Hal tersebut disebabkan upah di Provinsi Jawa Barat sangat bervariasi dikarenakan sistem upah di Indonesia yang terdesentralisasi kepada kepala daerah.

Pada tahun 2010 ump Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 671.500; tahun 2011 Jawa Barat tidak menetapkan ump, sehingga diambil dari umr terendah yaitu umr terendah di Provinsi Jawa Barat di kota Banjar sebesar Rp. 732.000; tahun 2012 ump Jawa Barat sebesar Rp. 780.000; tahun 2013 ump Jawa Barat sebesar Rp. 850.000; tahun 2014-2015 ump Jawa Barat sebesar Rp. 1.000.000; tahun 2016 ump Jawa Barat sebesar Rp. 1.250.000; tahun 2018 ump Jawa Barat sebesar Rp. 1.544.361; tahun 2019 ump Jawa Barat sebesar Rp. 1.668.373; dari dua puluh tujuh kabupaten/kota di Jawa Barat, terdapat beberapa kota yang memiliki umr dengan nilai tinggi, sehingga mempengaruhi keluar masuknya perusahaan industri. Dengan banyaknya perusahaan yang tutup bahkan pindah berinvestasi ke Provinsi lain sampai ke luar negeri menyebabkan pemutusan harapan kerja dan terjadinya pengangguran.

Perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya (Daniel, 2018). Sehingga pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada standar hidup yang lebih nyata dan kerja yang terus mengalami peningkatan. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDRB pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu

daerah dapat dilihat pada PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2010-2019 berada di angka 5-6%. Keberhasilan dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5-6% dapat dikatakan ideal karena dapat menyerap angkatan kerja baru.

Indikator lain dalam penentuan upah minimum yaitu melihat pada inflasi, Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun memiliki inflasi yang cukup fluktuatif. Inflasi pada tahun 2010 sebesar 6,62% lalu mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2011 menjadi 3,10%, pada tahun 2012 inflasi mencapai 3,86%, meningkat kembali pada tahun 2013 menjadi 9,15%, pada tahun 2014 mengalami sedikit penurunan menjadi 7,60%, lalu dari tahun 2015 sampai 2019 inflasi berada dikisaran angka 2-3%. Kenaikan upah minimum yang terus meningkat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung seperti yang telah dijelaskan diatas, sehingga menyebabkan banyaknya perusahaan yang menutup perusahaan dan pindah ke kota lain karena tidak mampu untuk mengikuti upah yang telah ditetapkan pada daerah-daerah yang berada di Provinsi Jawa Barat. Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada prinsipnya telah diatur bahwa perusahaan dilarang memberikan upah dibawah dari upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kebijakan upah minimum sangat mempengaruhi kesanggupan suatu perusahaan, dengan meningkatnya upah minimum tanpa melihat kesanggupan pada perusahaan akan mengakibatkan banyaknya perusahaan tutup, mengurangi karyawan bahkan sampai pindah ke kota lain yang memiliki nilai upah minimum yang masih terbilang rendah. Peran pemerintah akan semakin terlihat ketika pola hubungan pekerja dan pengusaha berubah menjadi hubungan industrial yang tidak saja melibatkan pekerja dan pengusaha akan tetapi menegaskan posisi pemerintah sebagai pihak ketiga. Sebab sebagai penganut “Negara Kesejahteraan” (welfare state) maka tidak ada alasan bagi Negara/Pemerintah untuk tidak memasuki segala lini kehidupan warga negaranya, dengan tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia, mental dan spiritual, atau dengan istilah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia (Wahyudi, et al 2016). Kebijakan upah minimum menjadi tantangan bagi pemerintah, dan berdampak kepada pengusaha bahkan tenaga kerja. Maka dari uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti formula perhitungan penetapan upah minimum dengan judul penelitian “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Upah Minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2019”

METODE

Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan tipe data panel. Data panel gabungan data runtut waktu (time series) dan data cross section. Data time series merupakan data dari satu objek dengan beberapa periode waktu tertentu, sedangkan data cross section merupakan data yang diperoleh dari satu maupun lebih objek penelitian dalam satu periode yang sama (Gujarati, 2012). Sampel pada penelitian ini menggunakan data time series (runtutatan waktu) yaitu selama 10 tahun dan menggunakan data mengenai

pertumbuhan ekonomi, Inflasi dan UNK Kota Provinsi Jawa Barat yang diambil dari 7 daerah yang ada di Jawa Barat.

Teknik analisa data yang digunakan yaitu menggunakan analisis deskriptif, analisis verifikatif dan analisis regresi data panel dengan bantuan *Software Statistic Eviews 10*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis deskriptif

Tabel 2
Hasil Analisis Deskriptif

	UMR	PE	IN
Mean	13.98587	6.320476	4.280476
Median	10.25000	6.140000	3.600000
Maximum	49.10000	8.530000	10.97000
Minimum	1.170000	4.900000	1.560000
Std. Dev.	9.993951	0.789825	2.216952
Observations	63	63	63

Sumber : Hasil Pengolahan Eviews 12 oleh peneliti

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa mean atau rata-rata sebesar 6.320476, nilai maksimum sebesar 8.530000, nilai minimum sebesar 4.900000 dan standar deviasi sebesar 0.789825. Hal ini berarti bahwa rata-rata peningkatan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat pada sampel objek penelitian sebesar 6.320476. Lalu pertumbuhan ekonomi dengan nilai terbesarnya adalah sebesar 8.530000 diperoleh oleh Kota Bandung pada tahun 2012 (lampiran), sedangkan pertumbuhan ekonomi dengan nilai terkecilnya adalah sebesar 4.900000 diperoleh oleh Kota Cirebon pada tahun 2013.

Pada variabel inflasi yang merupakan kenaikan harga-harga barang dagang secara berkelanjutan. Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa mean atau rata-rata sebesar 4.280476, nilai maksimum sebesar 10.97000, nilai minimum sebesar 1.560000 dan standar deviasi sebesar 2.216952. Hal ini berarti bahwa rata-rata kenaikan harga-harga barang secara berkelanjutan pada sampel objek penelitian sebesar 4.280476. Lalu inflasi dengan nilai terbesarnya adalah 10.97000 diperoleh oleh Kota Depok pada tahun 2013 sedangkan inflasi dengan nilai terkecilnya adalah 1.560000 diperoleh oleh Kota Cirebon pada tahun 2015.

Analisis Regresi Panel

Tabel 3
Analisis Regresi Data Panel

Dependent Variable: UMP
Method: Panel Least Squares
Sample: 2011 2019
Periods included: 9
Cross-sections included: 7
Total panel (balanced) observations: 63

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	13.93354	3.428757	4.063730	0.0001
PE	-1.541097	0.533249	-2.890015	0.0054
IN	1.239581	0.189594	6.538082	0.0000
Root MSE	3.408946	R-squared		0.424171
Mean dependent var	-1.17952	Adjusted R-squared		0.404977
S.D. dependent var	4.528433	S.E. of regression		3.493130
Akaike info criterion	5.385921	Sum squared resid		732.1174
Schwarz criterion	5.487975	Log likelihood		-166.6565
Hannan-Quinn criter.	5.426060	F-statistic		22.09883
Durbin-Watson stat	1.654120	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 12 oleh peneliti

Berdasarkan pada data tabel 3, maka persamaan regresi data panel yang terbentuk berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y = 13.93354\alpha - 1.541097PE + 1.239581IN$$

Dari persamaan regresi tersebut menunjukkan arah pengaruh variabel bebas pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap variabel terikat upah minimum regional. Dengan koefisien regresi variabel bebas bertanda positif menunjukkan bahwa memiliki pengaruh yang searah terhadap upah minimum regional, sedangkan jika koefisien variabel bebas bertanda negatif menunjukkan bahwa memiliki pengaruh yang berlawanan terhadap upah minimum regional yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jika diasumsikan nilai variabel pertumbuhan ekonomi (X1) dan inflasi (X2) adalah konstan atau sama dengan nol, maka nilai upah minimum provinsi (Y) naik sebesar 13.93%.
- 2) Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi (X1) sebesar -1.541097 menyatakan bahwa jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 1% secara signifikan, dan variabel lain bernilai tetap. Maka variabel pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan dari variabel UMP sebesar 1.54%.
- 3) Koefisien regresi inflasi (X2) sebesar 1.239581 menyatakan bahwa jika inflasi mengalami kenaikan 1% secara signifikan, variabel lain bernilai tetap. Maka variabel inflasi akan mengalami kenaikan dari variabel UMP sebesar 1.23%.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji t menguji apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak, dimana untuk kekuatan pada uji t adalah sebagai berikut (Suyono, 2015):

- a. H_0 diterima bila $-t \text{ hitung} \geq -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$ (tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen)
- b. H_0 ditolak bila $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ (terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen)

Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai probability $< 0,05$ maka dinyatakan berpengaruh.
- b. Jika nilai probability $> 0,05$ maka dinyatakan tidak berpengaruh.

Tabel 4.
Hasil Uji Regresi Data Panel

c

Method: Panel Least Squares

Sample: 2011 2019

Periods included: 9

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 63

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.93354	3.428757	4.063730	0.0001
PE	-1.541097	0.533249	-2.890015	0.0054
IN	1.239581	0.189594	0.538082	0.0000
Root MSE	3.408946	R-squared		0.424171
Mean dependent var	11.17952	Adjusted R-squared		0.404977
S.D. dependent var	4.528433	S.E. of regression		3.493130
Akaike info criterion	5.385921	Sum squared resid		732.1174
Schwarz criterion	5.487975	Log likelihood		-166.6565
Hannan-Quinn criter.	5.426060	F-statistic		22.09883
Durbin-Watson stat	1.654120	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 12 oleh Penulis

Nilai t tabel dapat dilihat pada tabel t statistik dengan $df = n - k$ atau $63 - 3 = 60$ dengan uji signifikansi 0.05 dan uji 2 sisi sehingga diperoleh hasil t tabel = 1.671/-1.671. Sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi (PE) terhadap upah minimum regional (UMR). Berdasarkan pada tabel 4.11 nilai probabilitas (PE) sebesar 0.0054 lebih rendah dari 0.05 dengan nilai t-statistik sebesar -2.890015 lebih rendah dari -1.671. Sehingga H_0 ditolak atau dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap upah minimum regional. Pengaruh inflasi (IN) terhadap upah minimum regional (UMR). Berdasarkan pada tabel 4.11 nilai probabilitas inflasi sebesar 0.0000 lebih rendah dari 0.05 dengan nilai t-statistik sebesar 6.538082 lebih besar dari 1.671. Sehingga H_0 ditolak atau dapat dijelaskan bahwa inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum regional.

Dari persamaan regresi diatas dapat dilihat nilai probabilitas dari setiap variabel independen. Untuk variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0054 lebih kecil dari alpha 0.05. Untuk variabel inflasi memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari alpha 0.05. sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi upah minimum provinsi Jawa Barat yaitu variabel inflasi.

Uji Simultan

Uji f statistik bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat dilihat dengan menggunakan Eviews. Dengan hipotesis sebagai berikut (Suyono, 2015):

- a. $F_{hit} < F_{tabel}$: maka H_0 diterima H_1 ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas (X_1, X_2) secara serentak terhadap variabel terikat (Y) adalah tidak signifikan.

b. $F_{hit} > F_{tabel}$: maka H_0 ditolak H_1 diterima, yang berarti bahwa variabel bebas (X_1, X_2) secara serentak terhadap variabel terikat (Y) adalah signifikan.

Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas f-statistiknya dengan kriteria sebagai berikut:

a. Jika nilai probabilitas f-statistik $< 0,05$ maka dinyatakan berpengaruh.

b. Jika nilai probabilitas f-statistik $> 0,05$ maka dinyatakan tidak berpengaruh.

Nilai F tabel dapat dilihat pada tabel F statistik pada $df_1 =$ jumlah variabel-1 atau $3-1 = 2$ dan $df_2 = n-k-1$ atau $63-3-1 = 59$ (k adalah jumlah variable independen). Dengan signifikansi 0,05 diperoleh hasil F tabel = 3.153.

Berdasarkan pada tabel 4.11 nilai f hitung sebesar 22.09883 lebih besar dari f tabel sebesar 3.153 dengan nilai probabilitas f-statistik sebesar 0.000000 lebih rendah dari 0.05. Sehingga H_0 ditolak dan dapat dijelaskan bahwa adanya hubungan secara simultan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap upah minimum provinsi Jawa Barat.

Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Upah Minimum Provinsi Jawa Barat

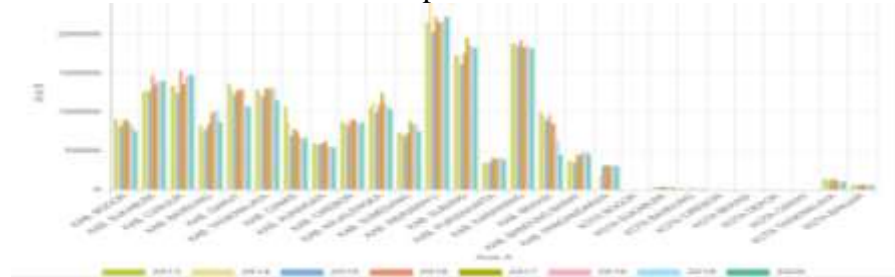
Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif dan signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi dengan upah minimum regional. Hasil uji parsial (uji t) antara variabel pertumbuhan ekonomi dengan upah minimum regional menunjukkan nilai t sebesar -2.890015 dan nilai probabilitas sebesar 0.0054 lebih rendah dari 0.05. nilai t hitung negatif diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap upah minimum regional. Maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap upah minimum regional.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Luh Kertasih dengan judul penelitian “Pengaruh Tingkat Inflasi dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi terhadap Upah Minimum Regional di Provinsi Bali”. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Luh Kertasih diperoleh perbandingan t.hitung yang lebih kecil dari nilai t.tabel yaitu $-0.151 < 2.0369$ dan nilai signifikansinya sebesar $0.881 < 0.05$ yang dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap upah minimum provinsi (Kertasih, 2017).

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Zahari dengan judul penelitian “Pengaruh Pertumbuhan ekonomi dan Inflasi terhadap Upah Minimum Provinsi Jambi”. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Zahari diperoleh nilai koefisien sebesar 3,078 dan nilai signifikansi $0.011 < 0.05$ yang dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum provinsi (Zahari, 2014).

Pertumbuhan ekonomi merupakan keadaan peningkatkan pendapatan karena adanya peningkatan produksi barang dan jasa. Dengan perekonomian yang tumbuh dapat memberikan kesejahteraan ekonomi bagi penduduk pada negara tertentu. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi diperlukannya alat ukur berupa output total yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun periode waktu tertentu. Hal tersebut dapat diukur dengan PDRB atas dasar harga konstan untuk melihat peningkatan produktifitas output. Dengan PDRB meningkat akan meningkatkan upah yang diberikan dikarenakan adanya kenaikan produktifitas.

Provinsi Jawa Barat masih didominasi oleh lahan pertanian, dimana pekerjaannya yaitu sebagai petani, dan buruh lepas. Wilayah Jawa Barat memiliki luas 3.338.000 ha, luas lahan yang digunakan untuk pesawahan seluas 928.218 ha, serta luas lahan industri seluas 19.602.92 ha. Berikut merupakan grafik lahan pesawahan di Jawa Barat berdasarkan Kabupaten/Kota:



Gambar 2 Luas Area Tanaman Padi di Kabupaten/Kota Jawa Barat

Sumber: Jabarprov.go.id

Dapat dilihat pada gambar 2 bahwa lahan di Jawa Barat masih banyak didominasi oleh lahan pesawahan dan untuk lahan industri masih terbilang cukup kecil dibandingkan dengan lahan pertanian dan perairan. Sehingga pertumbuhan ekonomi didominasi oleh sektor pertanian, perhutanan, perikanan, peternakan, dan perdagangan. Menurut Asfia (2013) bahwa daerah yang lambat pertumbuhannya yaitu daerah agraris yang mana PDRB didominasi oleh pertanian, perikanan, dan peternakan.

Kawasan industri di Jawa Barat masih belum merata, dikutip dari kemenperin.go.id bahwa sebagian besar berada di daerah Bekasi, Bogor, Sukabumi, Depok, Bandung, Karawang. Untuk kawasan Jawa Barat bagian timur masih didominasi oleh lahan agraris. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi terbilang lambat peningkatannya. Dilihat secara statistik bahwa setiap daerah di Jawa Barat mengalami pertumbuhan, tetapi pergerakannya masih lambat. Tetapi Jawa Barat merupakan daerah yang diincar oleh para investor untuk membangun kawasan industri. Menurut Annisa (2019) dalam media bisnis.com bahwa pada tahun 2020 akan adanya pembangunan kawasan industri di daerah Jawa Barat bagian timur. Karena para investor akan menjadikan Jawa Barat sebagai basis produksi dan rantai pasokannya untuk pasar global.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan pembangunan dimana pemerintah dan masyarakat dapat mengelola sumber daya yang ada dan dapat membentuk kerjasama dalam kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat menciptakan perkembangan kegiatan ekonomi pada wilayah tertentu. Menurut Palmer (2012) pertumbuhan ekonomi mengacu kepada peningkatan kapasitas produktif suatu perekonomian yang mampu menghasilkan tambahan barang dan jasa. Pentingnya pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan out put perkapita dapat menunjukkan pertumbuhan upah riil dan meningkatkan standar hidup. Apabila terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja yang diukur dengan PDRB, maka upah layak untuk ditingkatkan. Menurut Bachrun & Saifuddin (2012) perkembangan sektor industri modern dan majunya pertumbuhan ekonomi akan mampu melakukan perbaikan tingkat upah dan meningkatkan standar hidup masyarakatnya. Dengan belum meratanya

pembangunan ekonomi di Jawa Barat maka pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap upah minimum Jawa Barat.

Pengaruh Inflasi terhadap Upah Minimum Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara variabel inflasi dengan upah minimum regional. Hasil uji parsial (uji t) antara variabel inflasi dengan upah minimum regional menunjukkan nilai t sebesar 6.538082 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih rendah dari 0.05. nilai t hitung positif diartikan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap upah minimum regional. Maka dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum regional.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Andhika Permata Putri dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016”. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Andhika Permata Putri diperoleh perbandingan uji parsial $0.0000 < 0.05$ dan memiliki nilai probabilitas pengaruh yang signifikan terhadap upah minimum regional (Andhika, 2018).

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh M.Zahari M.S dengan judul “Pengaruh Perumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Upah Minimum Provinsi Jambi”. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Zahari diperoleh perbandingan uji parsial -0.923 dengan nilai probabilitas 0.376 yang dapat dijelaskan bahwa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap upah minimum provinsi jambi (Zahari, 2014).

Inflasi merupakan kenaikan harga-harga barang secara berkelanjutan. Hal ini akan menyebabkan keadaan perekonomian mengalami kecenderungan kenaikan harga-harga secara terus menerus. Inflasi dapat terjadi dikarenakan terlalu banyak uang yang dicetak dan beredar di lingkungan masyarakat sehingga menyebabkan permintaan masyarakat cukup tinggi. Inflasi juga dapat terjadi karena penurunan penawaran agregat, sehingga mengalami kenaikan harga input pokok dan menyebabkan biaya produksi barang-barang output sektor industri semakin mahal.

Berdasarkan asalnya, inflasi dapat terjadi karena inflasi dalam negeri atau *domestic inflation* terjadi karena defisit anggaran belanja pemerintah, karena kesalahan pengelolaan perekonomian di sektor riil maupun di sektor moneter oleh para pelaku ekonomi dan masyarakat. Inflasi yang berasal dari luar negeri atau *imported inflation* terjadi karena naiknya harga barang-barang impor, inflasi ini dapat terjadi jika suatu negara menganut sistem perekonomian terbuka atau negara-negara yang sedang berkembang yang membutuhkan alat dan bahan produksi dari luar negeri. Inflasi sering terjadi karena beberapa kasus inflasi atau kombinasi, bukan semata-mata hanya terjadi karena satu kasus inflasi (Adwin, 2015). Contohnya seperti *imported inflation* sering diikuti dengan *cost push inflation* dan untuk *domestic inflation* sering diikuti dengan *demand pull inflation*.

Di Provinsi Jawa Barat terkhususnya tujuh kota yang mengalami inflasi, pada tahun 2013 mengalami peningkatan inflasi yang cukup signifikan kisaran 6-10% peningkatan inflasi di tujuh kota Provinsi Jawa Barat tersebut. Kenaikan ini bukan hanya dirasakan oleh ketujuh kota yang ada di Jawa Barat, tetapi dampaknya secara nasional. Hal tersebut disebabkan karena harga bahan bakar minyak

mengalami kenaikan. Imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak menyebabkan komoditas lain ikut meningkat, seperti bahan pokok, tarif angkutan umum dan yang lainnya. Dipertegas oleh Hartadi (2019) inflasi di Jawa Barat mengalami kenaikan cukup tinggi pada November 2013 dan dalam hasil penelitiannya bahwa adanya perbedaan musim inflasi, yaitu adanya musim awal tahun, ramadhan, idul fitri, akhir tahun dan bulan lainnya diluar dari musim-musim tersebut. Sehingga komoditas-komoditas tertentu ikut meningkat disetiap musimnya.

Indonesia sebagai negara agraris sesuai dengan teori struktural bahwa struktur ekonomi agraris akan mengalami guncangan ekonomi yang berasal dari dalam negeri seperti gagal panen, ataupun hal yang berkaitan dengan hubungan luar negeri seperti utang luar negeri, dan kurs valuta asing yang dapat menyebabkan fluktuasi harga di pasar domestik. Dengan terjadinya inflasi maka terjadinya dorongan biaya, sehingga adanya kenaikan upah. Maka perusahaan memaksa untuk menaikkan harga barang dan jasa akibatnya adanya siklus upah dan harga jadi mengalami kenaikan.

Pengaruh Simultan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Upah Minimum Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan pada tabel hasil nilai f hitung sebesar 22.09883 lebih besar dari f tabel sebesar 3.153 dengan nilai probabilitas f -statistik sebesar 0.000000 lebih rendah dari 0.05. Sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat dijelaskan bahwa adanya hubungan secara simultan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap upah minimum provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian diperkuat oleh penelitian dari Muhamad Zahari dengan judul penelitian “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Provinsi Jambi Pada Tahun 2000-2013”. Dengan hasil penelitian bahwa f hitung lebih besar dari f tabel sebesar 6,054 > 3,98 yang artinya bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh positif terhadap UMP (Zahari, 2014).

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Luh Kertasih dengan judul penelitian “Pengaruh Tingkat Inflasi dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi terhadap Upah Minimum Regional (UMR) di Provinsi Bali pada Tahun 2008-2015”. Dengan hasil penelitiannya bahwa berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa f hitung = 0.015 < f tabel = 4.17 atau p -value = 0.985 > α = 0,05. Hal ini berarti H_0 ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel UMR (Kertasih, 2017).

Sesuai dengan pasal 25 nomor 7 tahun 2013 tentang upah minimum bahwa dalam penetapan upah melihat kepada produktivitas, pertumbuhan ekonomi, inflasi, yang didasarkan kepada kebutuhan hidup layak. Maka dalam hal ini Provinsi Jawa Barat dalam menetapkan upah minimum mendasarkan kepada pertumbuhan ekonomi dengan alat ukurnya $pdrb$ dan indikator lainnya yaitu inflasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap upah minimum provinsi Jawa Barat. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang

menurun. Hal tersebut dikarenakan jumlah output PDRB yang kecil. Variabel inflasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum provinsi Jawa Barat. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum disebabkan karena inflasi yang meningkat. Hal tersebut dikarenakan berkurang penawaran agregat, inflasi akan disertai resesi sehingga jumlah output (PDB) menjadi lebih kecil. Variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap upah minimum provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan pasal 25 nomor 7 tahun 2013 tentang upah minimum bahwa dalam penetapan upah melihat kepada produktivitas, pertumbuhan ekonomi, inflasi, yang didasarkan kepada kebutuhan hidup layak.

REFERENCES

- Adwin. (2015). Inflasi Di Indonesia: Sumber-Sumber Penyebab Dan Pengendaliannya. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 54–67. <https://doi.org/10.9744/jak.1.1.pp.54-67>
- Agung Hartadi. (2019). *Musim inflasi di Jawa Barat dan Penyebabnya*. 15(43), 115–119.
- Akhmad. (2018). *Implementasi Kebijakan Pengupahan Pada Usaha Mikro dan Kecil*. 13(1).
- Andhika Permata Putri. (2018). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016*.
- Arrista. (2014). *Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja*. 11–20.
- Asfia Murni. (2013). *Ekonomika Makro*. PT.REFIKA ADITAMA.
- Bachrun & Saifuddin. (2012). *Desain Pengupahan untuk Perjanjian Kerja Bersama*. PPM.
- BPS Indonesia. (2018). *STATISTIK*. 42, 1–16.
- BPS Jawa Barat. (2018). *Statistik Industri Besar dan Sedang JAWA BARAT 2018*.
- Devanto & Putu. (2011). *Kebijakan Upah Minimum untuk Perekonomian yang Berkeadilan : Tinjauan UUD 1945*. 269–284.
- Edy Dwi Kurniati. (2015). *Kewirausahaan industri*. deepublish.
- Gujarati. (2012). *Basic Econometrics*.
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Raja Grafindo Persada.
- Lih Eko Wahyudi., Wiwin Yulianingsih., F. S. (2016). *Hukum Ketenagakerjaan*. Sinar Grafika.
- Luh Kertasih. (2017). Pengaruh Tingkat Inflasi dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi terhadap Upah Minimum Regional di Provinsi Bali. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 9(1), 148. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v9i1.19999>
- M. Zahari. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap UMP Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.14*, 14(3), 31–37.
- M Indriani. (2016). *Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi*.
- M Wildan Azmi. (2012). *Pemberian Upah*. Ghalia Indonesia.
- Noel T Palmer. (2012). The Importance of Economic Growth. *CPA Ireland, March*, 1.
- Prima Audia Daniel. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Jambi. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*,

2(1), 131. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v2i1.37>

Prof.Dr Suyono MSi. (2015). *Analisis Regresi untuk Penelitian*. deepublish.

Sadono Sukirno. (2013). *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Raja Grafindo Persada.

Siswanto & Asrie. (2019). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. PT Bumi Aksara.